



RENJA - PD

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Daftar Tabel.....	2
BAB. I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat	46
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	51
3.3. Program dan Kegiatan	51
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	56
BAB. IV PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah.....	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.....	26
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah	35
Tabel 2.5	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	47
Tabel 3.3	Rumusan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	53
Tabel 4.1	Rumusan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik/masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- c. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk **tahun n** dan **tahun n+1**.

Penyusunan program kegiatan pada tahun 2022 ini berpedoman pada RPJMD 2022-2026 Provinsi Kalimantan Tengah dan RENSTRA Perangkat Daerah 2022-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, dengan sasaran pokok dan kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2020, serta memperhatikan RPJMN 2020-2024.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, RENSTRA Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

I.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 90);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai bidang urusan perangkat daerah di tahun 2022.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022;
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Pemerintahan Umum) dan laporan kinerja.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah dilakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan yang telah disusun dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka penyesuaian/ sinkronisasi program dan kegiatan yang ada.

Sejumlah program dan kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan sudah terpetakan dengan baik, serta sudah memperoleh hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah dirubah melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Secara singkat review hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :

- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan tahun 2020.

Secara umum program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 rata-rata tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran difokuskan untuk

penanganan dampak dari penyebaran COVID-19 sehingga mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah mengambil langkah-langkah kebijakan anggaran dengan melakukan pencermatan anggaran dengan merasionalisasi anggaran.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 900/013/TAPD/2020 tanggal 6 April 2020, perihal Rasionalisasi Anggaran terkait Dampak Penyebaran Covid-19, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah merasionalisasi anggaran dari Rp. 7.816.519.702,50 menjadi Rp. 3.269.330.584,95 berkurang sebesar Rp. 4.547.189.117,55. Dengan adanya rasionalisasi tersebut, sasaran program dan kegiatan prioritas tidak dapat dilaksanakan yang berdampak pada target kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai.

Selain hal tersebut, adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 13.084.188.526,- pada kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang didalamnya terdapat kegiatan Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan total anggaran sebesar Rp.13.365.354.700,-. Namun dari besaran anggaran tersebut, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.562.092.900,-. Hal ini sangat berpengaruh terhadap realisasi capaian kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah.

- b. Faktor penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan tahun 2020.

Realisasi Kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2020 pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Apabila diukur secara realisasi keuangan dari pagu sebesar Rp.16.672.298.486,95,- dapat direalisasikan sebesar Rp.6.573.297.531,- atau 39,43 %. Sedangkan realisasi fisik tercapai 99,76 %.

Realisasi anggaran sebesar 39,43% merupakan realisasi dari belanja kebutuhan operasional kantor antara lain alat tulis kantor,

Belanja perjalanan dinas, Belanja Honorarium, Belanja makanan dan minuman dan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum penyebaran Covid-19.

2.1.1 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Perangkat Daerah dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Realisasi Kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sebesar 59 % mempunyai implikasi atau berdampak kurang baik terhadap pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan akhir tahun 2020, hasil capaian RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 75 %.

2.1.2 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Penyusunan program kegiatan yang bersifat kelanjutan/berkesinambungan dari tahun sebelumnya mengacu pada program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019 serta berpedoman pada RPJMD 2022-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah 2022-2026.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 (terlampir).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100%	60%	20%	20%	100%	20%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar (surat)	648	432	108	108	100%	108	540	83%
1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar (rekening)	36	24	6	6	100%	6	30	83%
1.05.1.05.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah polis asuransi yang dibayar (polis)	6	3	1	0	0%	1	5	83%
1.05.1.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional (unit)	84	56	14	14	100%	14	70	83%
1.05.1.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola uang dan barang serta tim pengadaan barang dan jasa (orang)	240	165	45	45	100%	40	205	85%
1.05.1.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor (orang)	102	68	17	17	100%	17	85	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor (jenis)	196	137	39	39	100%	39	176	90%
1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan (lembar)	1062000	708000	177000	177000	100%	177000	885000	83%
1.05.1.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen penerangan (lampu)	306	204	51	51	100%	51	255	83%
1.05.1.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	36	24	6	6	100%	6	30	83%
1.05.1.05.01.01.17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan untuk rapat intern kantor, Jumlah makanan untuk tamu (kotak)	3300	2200	550	550	100%	550	2750	83%
1.05.1.05.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	72	48	12	12	100%	12	60	83%
1.05.1.05.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah (kali)	162	108	27	27	100%	27	135	83%
1.05.1.05.01.01.26	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Teknis Program Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumen yang diperlukan untuk monitoring, evaluasi dan pembinaan program (jenis)	72	48	12	12	100%	12	60	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.35	Rujukan Berobat PNS	Jumlah pegawai yang terbantu untuk rujukan berobat keluar daerah (orang)	6	3	0	0	0%	0	3	50%
1.05.1.05.01.01.38	Rapat Konsultasi / Konsultasi / Rakernis	Jumlah pelaksanaan kegiatan rakor (kali)	6	4	1	1	100%	1	5	83%
1.05.1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	60%	20%	20%	100%	20%	100%	100%
1.05.1.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	102	68	17	17	100%	0	68	67%
1.05.1.05.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	40	28	8	8	100%	0	28	70%
1.05.1.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara (unit)	180	120	30	30	100%	30	150	83%
1.05.1.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara (unit)	120	80	20	20	100%	20	100	83%
1.05.1.05.01.02.50	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah ruangan kantor yang direhab (ruangan)	12	8	6	6	100%	0	8	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05 . 1.05.01. 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	100%	60%	20%	20%	100%	0%	80%	80%
1.05 . 1.05.01. 03 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (stel)	720	480	120	120	100%	0	480	67%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang diadakan (stel)	360	60	60	60	100%	0	60	17%
	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian yang diadakan (stel)	360	60	0	0	0%	0	60	17%
1.05 . 1.05.01. 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	100%	60%	0%	0%	0%	0%	60%	60%
1.05 . 1.05.01. 05 .01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan kursus (orang)	90	60	0	0	0%	0	60	67%
1.05 . 1.05.01. 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan dan kesesuaian laporan capaian kinerja dan laporan keuangan (%)	100%	60%	20%	20%	100%	20%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (laporan)	12	8	2	2	100%	2	10	83%
1.05.1.05.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	6	4	1	1	100%	1	5	83%
1.19.1.19.01.06.05	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA (dokumen)	1	1	0	0	0%	0	1	100%
1.19.1.19.01.06.06	Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA (dokumen)	12	8	2	2	100%	2	10	83%
1.05.1.05.01.06.14	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (laporan)	6	4	1	1	100%	1	5	83%
1.19.1.19.01.06.15	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen RENJA (dokumen)	12	8	2	2	100%	2	10	83%
1.19.1.19.01.06.33	Penyusunan laporan TEPPA	Jumlah laporan TEPPA/SIMPPD (laporan)	126	63	12	0	0%	12	87	69%
1.19.1.19.01.06.35	Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD	Jumlah laporan LKPJ dan LPPD (laporan)	12	8	2	2	100%	2	10	83%
1.19.1.19.01.06.42	Penyusunan Rencana serta Program kegiatan	Jumlah dokumen rencana program serta program kegiatan (dokumen)	6	4	1	1	100%	1	5	83%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.01.08	PROGRAM PENGEMBANGAN ASET/BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan pengembangan aset/barang milik daerah (%)	100%	60%	20%	20%	100%	20%	100%	100%
1.19.1.19.01.08.01	Pengelolaan Inventaris Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah (laporan)	30	20	5	5	100%	5	25	83%
1.19.1.19.01.15	PROGRAM KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah peta daerah rawan konflik dari sudut pandang intelijen (peta)	5	2	0	0	0%	1	3	60%
1.19.1.19.01.15.08	Identifikasi daerah rawan konflik	Jumlah laporan tentang Data Rawan Konflik di kabupaten (laporan)	48	24	0	0	0%	1	25	52%
1.19.1.19.01.15.10	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (kali)	24	28	16	16	100%	16	44	183%
1.19.1.19.01.15.20	Pelaksanaan Deteksi Dini Bagi Aparatur Kesbang	Jumlah aparatur kesbang yang mengikuti deteksi dini (kali)	200	50	0	0	0%	50	100	50%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.01.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Jumlah kegiatan kerjasama pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (kegiatan)	60	40	10	10	100%	10	60	100%
1.19.1.19.01.16.02	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan aparat keamanan (kali)	60	40	10	10	100%	0	40	67%
1.19.1.19.01.16.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan situasi daerah dari kab/kota se-Kalteng (laporan)	1008	672	168	168	100%	168	840	83%
1.19.1.19.01.16.06	Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan orang asing (laporan)	72	48	12	12	100%	12	60	83%
1.19.1.19.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Masyarakat yang wawasan kebangsaan (orang)	10500	5450	1750	200	11%	1750	7400	70%
1.19.1.19.01.17.03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat (orang)	600	300	100	0	0%	100	500	83%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
-	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah peserta yang mengikuti forum (orang)	600	500	200	200	100%	200	700	117%
1.19.1.19.01.17.11	Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (laporan)	600	300	100	0	0%	100	500	83%
1.19.1.19.01.17.12	Ikrar Anak Bangsa	Jumlah peserta kegiatan Ikrar Anak Bangsa (orang)	8100	4050	1350	0	0%	1350	6750	83%
1.19.1.19.01.18.19	Sarasehan Pembauran Kebangsaan Untuk Memperkokoh Persatuan Bagi Tomas, Toga dan Todat	Jumlah peserta dari unsur tomas, toga dan todat	450	0	0	0	0%	0	0	0%
1.19.1.19.01.18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah anggota masyarakat yang memahami rasa persatuan dan kesatuan cinta tanah air dan bela negara yang kuat (orang)	10850	4500	1500	0	0%	1550	6050	56%
1.19.1.19.01.18.04	Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda	Terlaksananya kegiatan Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda (orang)	600	300	200	0	0%	150	650	108%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.01.18.11	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran bela negara (orang)	8400	4200	1400	0	0%	1400	7000	83%
1.19.1.19.01.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Peringkat nasional Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (RA PKS)	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	100%	10 besar	10 besar	83%
1.19.1.19.01.19.06	Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah	Jumlah laporan penanganan gangguan keamanan di daerah (Laporan)	18	12	3	3	100%	3	15	83%
1.19.1.19.01.21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia	Peringkat 10	Peringkat 14	Peringkat 14	Peringkat 5	100%	Peringkat 13	Peringkat 13	100%
1.19.1.19.01.21.03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta dari parpol yang mengikuti forum koordinasi (orang)	468	234	78	0	0%	78	390	83%
1.19.1.19.01.21.06	Peningkatan Demokratisasi	Jumlah generasi muda yang mengikuti fasilitasi pemahaman tentang demokratisasi (orang)	600	300	200	0	0%	100	600	100%
1.19.1.19.01.21.07	Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Legislatif	Jumlah peserta kegiatan kerjasama (orang)	600	300	0	0	0%	0	500	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.01.21.08	Penyempurnaan Penguatan Kelembagaan Ormas/LSM	Jumlah peserta penguatan kelembagaan Ormas/LSM (orang)	600	300	0	0	0%	0	300	50%
1.19.1.19.01.21.09	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu di Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilu (kabupaten/kota)	84	56	14	14	100%	14	70	83%
1.19.1.19.01.21.12	Sarasehan Peningkatan Wawasan Politik Perempuan	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik perempuan (orang)	600	300	0	0	0%	0	500	83%
1.19.1.19.01.21.27	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Jumlah peserta kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (orang)	600	300	0	0	0%	100	500	83%
1.19.1.19.01.23	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI	Jumlah anggota masyarakat yang memahami pentingnya pelestarian sosial budaya dan ekonomi di daerah (orang)	3600	1900	600	100	17%	425	2425	67%
1.19.1.19.01.21.01	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	600	300	0	0	0%	0	400	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.01.21.02	Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya (orang)	600	300	0	0	0%	0	300	50%
1.19.1.19.01.21.04	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Dalam Rangka Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Dalam Rangka Ketahanan Sosial Budaya (orang)	600	300	0	0	0%	100	500	83%
1.19.1.19.01.21.05	Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya se-Kalteng	Jumlah laporan monitoring dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya se-Kalteng (laporan)	6	4	1	1	0%	1	5	83%
1.19.1.19.01.21.09	Peningkatan Kepedulian Masyarakat terhadap ketahanan budaya di daerah	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap ketahanan sosial budaya di daerah (orang)	900	450	0	0	0%	0	450	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.01.21.10	Tim pemantau dan evaluasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Jumlah laporan tim pemantau dan evaluasi pelestarian pengembangan budaya daerah ke provinsi lainnya (laporan)	6	3	0	0	0%	0	3	50%
1.19.1.19.01.21.11	Dialog Pembinaan Kerukunan Umat Beragama sejak usia dini	Jumlah pelajar yang mengikuti dialog pembinaan kerukunan umat beragama sejak usia dini (orang)	900	450	0	0	0%	100	650	72%
1.05.1.05.01.23.19	Peningkatan Rasa Nasionalisme Bebas Narkoba Bagi Generasi Muda	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan rasa nasionalisme bebas narkoba bagi generasi muda	750	375	0	0	0%	125	625	83%
	Penyempurnaan Penguatan Kelembagaan Ormas/LSM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan rasa nasionalisme bebas narkoba bagi generasi muda	400	200	100	100	100%	100	300	75%
1.19.1.19.01.27	PROGRAM DATA DAN INFORMASI	Peningkatan penyediaan data dan informasi (%)	100%	60%	20%	20%	100%	20%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.01.27.01	Ekspos Pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan yang diikuti (kegiatan)	9	7	1	1	100%	1	8	89%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan acuan tersebut terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Secara ringkas kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kegiatan Pembinaan Partai Politik

Kegiatan pembinaan terhadap partai politik di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 6 kegiatan sesuai dengan target yang tertuang di RENSTRA Perangkat Daerah yakni 6 kegiatan. Dampak rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan partai politik ini adalah 0 % (tidak terlaksana).

2.2.2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Provinsi Kalimantan selama tahun 2019 dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 1 kegiatan. Sesuai dengan target yang tertuang di RENSTRA Perangkat Daerah adalah 1 kegiatan. Dampak rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan partai politik ini adalah 0 % (tidak terlaksana).

2.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia

Berdasarkan skor Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur dari berbagai aspek/variable, maka untuk tahun 2018 Provinsi Kalimantan Tengah berada pada urutan ke 25 nasional. Hal ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebelumnya yakni peringkat 13 nasional.

Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam oleh Badan Pusat Statistik.

Dampak rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan partai politik ini adalah 0 % (tidak terlaksana).

2.2.4 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pengembangan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2020 terdiri dari berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Sesuai dengan yang tertuang di RENSTRA Perangkat Daerah, target yang ditetapkan adalah jumlah masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan sebanyak 1.750 orang.

Dampak rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan partai politik ini adalah 11 %. Realisasi tersebut merupakan kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dengan target sebanyak 200 orang.

2.2.5 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dilakukan melalui upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum di Provinsi Kalimantan Tengah. Kerjasama berupa koordinasi ini ditargetkan sebanyak 5 kegiatan

selama tahun 2020. Capaian ini berada di bawah target RENSTRA Perangkat Daerah untuk tahun 2020 sebanyak 10 kegiatan.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2 (terlampir).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	Target SPM / standar nasional	Target IKK	Target RENSTRA PERANGKAT DAERAH						Realisasi Capaian						Proyeksi 2022	Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kesatuan Bangsa dan Politik																
1.	Pembinaan terhadap Ormas/LSM/OKP aktif (Jumlah Ormas/LSM/OKP aktif)	-	-	142	150	158	165	170	180	142	158	158	165	0	-	180	
2.	Pembinaan partai politik di Provinsi Kalimantan Tengah (Jumlah Partai Politik Provinsi)	-	-	12	12	12	16	16	16	12	12	12	16	0	-	12	
3.	Indeks Demokrasi Indonesi (IDI) di Provinsi Kalimantan Tengah (Peringkat IDI)	-	-	15	14	13	12	12	11	15	11	25	5	TAD	-	10	
4.	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (Jumlah masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan)	-	-	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	200	-	1750	
5.	Jumlah kegiatan kerjasama pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal (Jumlah Laporan/kegiatan)	-	-	10	10	10	10	10	10	10	3	6	7	10	-	50	
6.	Kegiatan intelijen daerah dalam rangka deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum (Jumlah Laporan / kegiatan)	-	-	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	-	0	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sesuai telaahan dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L dan Kabupaten/Kota, Implikasi dari RT/RW dan KLHS, dapat dirumuskan isu-isu penting/strategis, sebagai berikut :

2.3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kalimantan Tengah dengan ibukotanya adalah Kota Palangka Raya terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota memiliki luas 157.983 km² dan berpenduduk sekitar 2.490.178 jiwa, yang terdiri atas 1.299.013 laki-laki dan 1.191.165 perempuan (hasil SUPAS 2015).

Dengan luasan wilayah tersebut Provinsi Kalimantan Tengah didiami berbagai macam suku bangsa dari seluruh wilayah di Indonesia. Suku asli dan dominan di Kalimantan Tengah yaitu Suku Dayak, sedangkan Suku dominan lainnya yakni suku Banjar dan Suku Jawa. Dari segi agama di Provinsi Kalimantan Tengah juga terdapat 5 agama nasional yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, serta terdapat kepercayaan lokal yakni Kaharingan yang merupakan kepercayaan penduduk asli Kalimantan Tengah.

Adanya keanekaragaman suku, budaya, agama dan partai politik serta berbagai jenis kelembagaan tersebut menjadikan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang cukup rawan terjadinya perselisihan antar suku dan agama serta gesekan-gesekan yang berpotensi terjadinya konflik.

2.3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

a. Visi

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:
“Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

b. Misi

Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b) Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- c) Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e) Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- f) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (*ecotorism*) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- g) Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- h) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang

mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

Pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- b) Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c) Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- d) Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan local;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government);
- b) Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- c) Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;

- d) Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public;
- e) Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.
- f) Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- g) Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usah, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

Pokok misi 4, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- b) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan

pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;

- e) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut :

- a) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- e) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

2.3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Kabupaten/Kota.

Secara hierarki Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu

berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Secara umum arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk tahun 2022 adalah Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kualitas Demokrasi, berupa penanganan konflik sosial dan peningkatan kapasitas Partai Politik.

2.3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Tengah, perlu didukung oleh terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga Kerukunan dan Kedamaian Masyarakat akan dapat terpelihara dengan baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Tata ruang wilayah dan lingkungan hidup memiliki pengaruh terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat setempat, dengan demikian sangatlah sulit untuk merubah pola kehidupan masyarakat yang sudah mengakar dengan nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat yang berbeda dengan mengandalkan sifat-sifat kedaerahannya masing-masing.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya benturan kelompok kepentingan dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah kedepan berusaha untuk meningkatkan Kerukunan dan kedamaian masyarakat secara efektif dan efisien.

Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi kendala bagi pemerintah dalam memantau dan memonitor daerah-daerah tertentu yang dimungkinkan terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian setidaknya untuk memperkecil resiko konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir dengan memberikan pendidikan politik, peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan, bela negara, pencegahan tindak kriminal, pembauran dan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi pertahanan keamanan yang terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kalimantan Tengah dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik masyarakat masih rendah dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Kalimantan Tengah serta konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- b. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan, Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (law enforcement) dan peningkatan demonstrasi yang memprotes kebijakan Pemerintah.
- c. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun dapat dilihat dari kecenderungan semakin

maraknya conflict and communal violence (konflik dan kekerasan komunal) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

- d. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan program kegiatan pada tahun 2022 mengacu pada RPJMD 2022-2026, RENSTRA Perangkat Daerah 2022-2026, serta sasaran pokok dan kebijakan yang tertuang di dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2020. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 yang disusun ini akan menjadi bagian dari RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2016-2021. Review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.4 (terlampir).

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Rancangan Awal RKPd						Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.076.032.941	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.563.532.966	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	532.132.701	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	532.132.701	
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	47.759,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	47.759,000	
	8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	19,161,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	19,161,500	
	8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	19,154,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	19,154,500	
	8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4,419,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4,419,000	
	8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4,156,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4,156,000	
	8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 dokumen laporan	217,188,701	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 dokumen laporan	217,188,701	
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	220,294,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	220,294,000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan						Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5,369,484,573	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.856.984.573		
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	5,193,989,073	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	4.681.489.073		
	8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	Jumlah pejabat Pengelola Uang dan Barang	40 orang	159,451,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	Jumlah pejabat Pengelola Uang dan Barang	40 orang	159,451,000		
	8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	7,170,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	7,170,200		
	8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	jumlah laporan keuangan semesteran	2 dokumen	8,874,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	jumlah laporan keuangan semesteran	2 dokumen	8,874,300		
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	5 dokumen	22,826,300	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	5 dokumen	22,826,300		
	8.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	Jumlah polis asuransi yang dibayar	1 unit	8,850,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	Jumlah polis asuransi yang dibayar	1 unit	8,850,000		
	8.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	5 laporan	13,976,300	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	5 laporan	13,976,300		
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100%	81.265.000		
	8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	Tersedianya pakaian dinas ASN	58 stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	Tersedianya pakaian dinas ASN	58 stel	81.265.000		
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor	100%	989,116,480	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor	100%	989,116,505		
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Palangka Raya	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	51 buah	25,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Palangka Raya	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	51 buah	25,000,000		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
		Kantor		bangunan kantor yang tersedia			Kantor		bangunan kantor yang tersedia			
	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	80,751,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	19 Jenis	80,751,025	
	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	6 Jenis	100,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	6 Jenis	100,000,000	
	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	6 jenis	38,270,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	6 jenis	38,270,000	
	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 tahun	745,095,480	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palangka Raya	Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 tahun	745,095,480	
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 paket	130,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 paket	130,000,000	
	8.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 paket	130,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 jenis	130,000,000	
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,184,752,887	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,184,752,887	
	8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah surat keluar	108 surat	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah surat keluar	108 surat	3,500,000	
	8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	1 tahun	237,662,887	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	1 tahun	237,662,887	
	8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Gaji tenaga kontrak dan Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan	1 tahun	943,590,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Gaji tenaga kontrak dan Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan	1 tahun	943,590,000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	847,720,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	766.455.000	
	8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	14 Unit	220,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	21 Unit	220,000,000	
	8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 paket	510,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 paket	428.735.000	
	8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	20 Unit	82,370,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	20 Unit	82,370,000	
	8.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	30 Unit	35,350,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	30 Unit	35,350,000	
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200 orang	3,200,000,000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200 orang	1.989.672.607	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Dokumen Laporan	3,200,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Dokumen Laporan	1.989.672.607	
	8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Program Kerja Kebijakan Teknis Dan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Dokumen Laporan	1,000,000,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Program Kerja Kebijakan Teknis Dan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Dokumen Laporan	945.483.500	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
	8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Dokumen	200,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Dokumen	0	
	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14 dokumen Laporan	1,800,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14 dokumen Laporan	1,044.189.107	
	8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Dokumen	200,000,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kab/Kota	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Dokumen	0	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	81, 16	2,026,179,000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	81, 16	2,026,179,000	

No.	Rancangan Awal RKP						Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16 Dokumen	2,026,179,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16 Dokumen	2.020.629.000	
	8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Dokumen	75,700,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
	8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di	1 Dokumen	24,300,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	0	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Daerah Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Dokumen	125,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab/Kota	di Daerah Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Dokumen	125,000,000	
	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Dokumen	1,601,179,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Dokumen	1,601,179,000	
	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	2 Dokumen	200,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	2 Dokumen	194.450.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
				Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Pembinaan terhadap Ormas/LSM aktif (Persen)	75	450,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Pembinaan terhadap Ormas/LSM aktif (Persen)	75	100,000,000	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	2 dokumen	450,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	2 dokumen	100,000,000	
	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen	450,000,000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen	100,000,000	
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	175 orang	1,375,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	175 orang	1.368.350.000	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 Dokumen	1,375,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 Dokumen	1.368.350.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
	8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Dokumen	1,275,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab/Kota	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Dokumen	1.268.350.000	
	8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Dokumen	100,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Dokumen	100,000,000	
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus)	70	2,773,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus)	70	2.460.444.000	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 dokumen	2,773,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 dokumen	2.460.444.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
	8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 dokumen	138,000,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 dokumen	138,000,000	
	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 dokumen laporan	150,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab/Kota	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 dokumen laporan	150,000,000	
	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	4 dokumen laporan	120,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	4 dokumen laporan	120,000,000	

No.	Rancangan Awal RKP						Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	di Daerah Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 dokumen laporan	335,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab/Kota	di Daerah Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 dokumen laporan	335,000,000	
	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Palangka Raya	Jumlah dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 dokumen laporan	2.030,000,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Palangka Raya	Jumlah dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 dokumen laporan	1.717.444.000	
						18,900,211,941					16.502.628.573	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT

Tahapan-tahapan dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 antara lain dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah, RKPD Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya dapat disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 ini terdapat beberapa usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah kabupaten / kota yang ditujukan langsung kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah (tabel 2.4 terlampir).

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	8.01.02 - PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
	8.01.02.1.01.01 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Katingan	Forum Pembauran Kabupaten Katingan	50 Orang	Sasarannya tidak diketahui berapa target peserta dari unsur apa saja dan disertai rincian
	8.01.02.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Katingan	Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Kabupaten Katingan	50 Orang	Sasarannya tidak diketahui berapa target peserta dari unsur apa saja dan disertai rincian
II	8.01.03 - PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
	8.01.03.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Katingan	Pelaksanaan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Katingan	50 Orang	Sasarannya tidak diketahui berapa target peserta dari unsur apa saja dan disertai rincian
	8.01.03.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sukamara	Pelaksanaan Pembinaan/Sosialisasi Politik terhadap Partai Politik, Masyarakat dan Pelajar	1 kegiatan	Sasarannya tidak diketahui berapa target jumlah peserta dan disertai rincian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8.01.03.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Barito Utara	Sosialisasi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	2 kali	Sasarannya tidak diketahui berapa target jumlah peserta dan disertai rincian
	8.01.03.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Barito Selatan	Pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Barito Selatan	25 desa	Sasarannya tidak diketahui berapa target jumlah peserta dan disertai rincian
III	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat				
	8.01.04.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Barito Utara	Pembinaan Ormas dan LSM	2 kali	Sasarannya tidak diketahui berapa target jumlah peserta dan disertai rincian

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berpedoman pada Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas nasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan memperhatikan sinergitas antara program Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah :

- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode 2020-2024 disusun sebagai penjabaran Visi Misi, Program Aksi Presiden Ir. H. JOKO WIDODO dan Wakil Presiden KH. MA'RUF AMIN, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan visi pembangunan nasional yaitu mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Periode 2020-2024 adalah “INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH - TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN”.

Tujuan strategis bidang politik dan pemerintahan umum adalah “**Kokohnya Persatuan dan Kesatuan serta Karakter Bangsa melalui pengamalan Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Kebhinekaan sebagai tatanan serta perilaku hidup berbangsa dan Bernegara**”. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, dengan indikator kinerja utama yaitu jumlah peristiwa konflik sosial.
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas, dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu dan pilkada; dan Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada.

Keterkaitan agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 dengan bidang urusan politik dan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. (Melalui fasilitasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, fasilitasi politik dalam negeri, dan fasilitasi ormas).
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. (Fasilitasi politik dalam negeri).
3. Melakukan revolusi karakter bangsa. (Bina ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan).
4. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia. (Bina ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan serta Fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, maka Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan :

- a. Terwujudnya pengamalan masyarakat Kalimantan Tengah terhadap Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama dan kemasyarakatan di Kalimantan Tengah .
- d. Terwujudnya kehidupan politik masyarakat Kalimantan Tengah yang demokratis, sehat dan santun.

3.2.2 Sasaran :

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
- b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif;
- d. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3 di bawah ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Demokrasi
2. Meningkatkan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila, dan;
4. Meningkatkan Kewaspadaan Dini Di Daerah

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebagaimana telah dipetakan sesuai dengan kebijakan ketentuan rumusan program dan kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Jumlah program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022 berjumlah 5 program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan strategis ini adalah sebesar Rp. 7,473,755,400. Nilai Total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 (terlampir).

Tabel 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	Palangka Raya	78,25	5.578.172.250	APBD	IKU Badan Kesbangpol	78,50	2,020,629,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Palangka Raya	1 dokumen	5.578.172.250	APBD		1 dokumen	2,020,629,000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	183.906.000	APBD		1 dokumen	100,000,000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	660 orang	317.100.000	APBD		100 orang	125,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	4.944.207.750	APBD		100 orang	1,601,179,000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	132.958.500	APBD		4 laporan	194,450,000
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Dan Okp Aktif (Persen)	Palangka Raya	75%	198.514.000	APBD	IKU Badan Kesbangpol	80%	100,000,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Palangka Raya	1 dokumen	198.514.000	APBD		1 dokumen	100,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Palangka Raya	50 Orang	198.514.000	APBD		50 orang	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	Palangka Raya	100 orang	969.914.900	APBD	IKU Badan Kesbangpol	200 orang	1,989,672,607
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	1 dokumen	969.914.900	APBD		1 dokumen	1,989,672,607
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	817.662.900	APBD		1 dokumen	945,483,500
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	152.252.000	APBD		100 orang	1,044,189,107
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	Palangka Raya	70%	1.665.094.000	APBD	IKU Badan Kesbangpol	80%	2,460,444,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	1 dokumen	1.665.094.000	APBD		1 dokumen	2,460,444,000
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	117.762.000	APBD		1 dokumen	138,000,000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	165.961.000	APBD		100 orang	150,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	56 orang	215.047.000	APBD		56 orang	120,000,000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Palangka Raya	4 laporan	365.533.000	APBD		4 laporan	335,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah	Daerah							
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Palangka Raya	4 dokumen	800.791.000	APBD		4 dokumen	1,717,444,000
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Palangka Raya	240 orang	1.062.060.250	APBD	IKU Badan Kesbangpol	200 orang	1,368,350,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Palangka Raya	1 dokumen	1.062.060.250	APBD		1 dokumen	1,368,350,000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	240 orang	992.894.250	APBD		200 orang	1,268,350,000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	69.166.000	APBD		4 laporan	100.000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel ini berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran RENSTRA PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang urusan/Program rutin Sekretariat Perangkat Daerah terdiri dari 1 program, 8 kegiatan serta 27 sub kegiatan;
2. Program Prioritas/Program Strategis Urusan Perangkat Daerah terdiri dari 5 program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

Total kebutuhan dan untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17,315,329,00. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti ditunjukkan pada tabel 4.1 (terlampir).

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	Palangka Raya	78,25	5.578.172.250	APBD	IKU Badan Kesbangpol	78,50	2.020,629,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Palangka Raya	1 dokumen	5.578.172.250	APBD		1 dokumen	2.020,629,000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	183.906.000	APBD		1 dokumen	100.000,000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	660 orang	317.100.000	APBD		100 orang	125.000,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	4.944.207.750	APBD		100 orang	1,601,179,000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	132.958.500	APBD		4 laporan	194,450,000
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Dan Okp Aktif (Persen)	Palangka Raya	75%	198.514.000	APBD	IKU Badan Kesbangpol	80%	100,000,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Palangka Raya	1 dokumen	198.514.000	APBD		1 dokumen	100,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang	Palangka Raya	50 Orang	198.514.000	APBD		50 orang	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	Palangka Raya	100 orang	969.914.900	APBD	IKU Badan Kesbangpol	200 orang	1,989,672,607
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	1 dokumen	969.914.900	APBD		1 dokumen	1,989,672,607
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	817.662.900	APBD		1 dokumen	945,483,500
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	152.252.000	APBD		100 orang	1,044,189,107
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	Palangka Raya	70%	1.665.094.000	APBD	IKU Badan Kesbangpol	80%	2,460,444,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	1 dokumen	1.665.094.000	APBD		1 dokumen	2,460,444,000
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	117.762.000	APBD		1 dokumen	138,000,000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	165.961.000	APBD		100 orang	150,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	56 orang	215.047.000	APBD		56 orang	120,000,000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Palangka Raya	4 laporan	365.533.000	APBD		4 laporan	335,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Palangka Raya	4 dokumen	800.791.000	APBD		4 dokumen	1,717,444,000
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Palangka Raya	240 orang	1.062.060.250	APBD	IKU Badan Kesbangpol	200 orang	1,368,350,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Palangka Raya	1 dokumen	1.062.060.250	APBD		1 dokumen	1,368,350,000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	240 orang	992.894.250	APBD		200 orang	1,268,350,000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	69.166.000	APBD		4 laporan	100,000,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	7.841.573.600	APBD		100%	8,563,532,966
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Palangka Raya	6 dokumen	141.151.550	APBD		6 dokumen	532,132,701
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	2 dokumen	10.049.800	APBD		2 dokumen	47,759,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	10.737.000	APBD		1 dokumen	19,161,500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	10.282.500	APBD		1 dokumen	19,154,500
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	6.953.000	APBD		1 dokumen	4,419,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	5.197.800	APBD		1 dokumen	4,156,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	4 laporan	9.610.200	APBD		4 laporan	217,188,701
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	4 laporan	88.321.250	APBD		4 laporan	220,294,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palangka Raya	100%	5.103.726.643	APBD		100%	4,856,984,573
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	37 orang / bulan	4.936.600.432	APBD		37 orang / bulan	4,681,489,073
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	12 dokumen	159.375.800	APBD		12 dokumen	159,451,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	4.014.200	APBD		1 Laporan	7.170,200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Palangka Raya	12 laporan	3.736.000	APBD		12 laporan	8.874,300
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Palangka Raya	5 dokumen	10.690.500	APBD		5 dokumen	22.826,300
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	8.831.600	APBD		1 dokumen	8.850,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Palangka Raya	4 laporan	1.858.900	APBD		4 laporan	13.976,300
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor	Palangka Raya	100%	310.703.973	APBD		100%	989.116,505
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Palangka Raya	1 paket	2.823.000	APBD		1 paket	25.000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	1 paket	31.226.000	APBD		1 paket	80.751,025
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palangka Raya	1 paket	12.676.973	APBD		1 paket	100.000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palangka Raya	6 dokumen	10.162.000	APBD		6 dokumen	38.270,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Palangka Raya	12 laporan	253.816.000	APBD		12 laporan	745.095,480
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palangka Raya	100%	1.008.284.000	APBD		100%	130.000,000
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Palangka Raya	1 unit	703.650.000	APBD		-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palangka Raya	13 unit	304.634.000	APBD		4 unit	130.000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	1.071.157.145	APBD		100%	1.184,752,887
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	4 laporan	1.000.000	APBD		4 laporan	3.500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palangka Raya	4 laporan	228.734.185	APBD		4 laporan	237.662,887
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	4 laporan	841.422.960	APBD		4 laporan	943.590,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	195.860.000	APBD		100%	766,455,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palangka Raya	21 Unit	102.360.000	APBD		21 Unit	220.000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ang	Palangka Raya	1 unit	49.150.000	APBD		1 unit	428,735,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Palangka Raya	35 Unit	24.830.000	APBD		20 Unit	82,370,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Palangka Raya	32 Unit	19.520.000	APBD		30 Unit	35,350,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022.

Rencana Kerja Perangkat daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang

terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita, Amin.

Palangka Raya, Juli 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AGUS PRAMONO, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610817 198603 1 034